

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor publik sering dinilai negatif oleh beberapa pihak, misalnya dalam persoalan pembelanjaan anggaran sering terjadi pemborosan dana, sarang inefisiensi, dan tidak memihak masyarakat. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik menimbulkan gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan pada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah.

Munculnya kritik keras yang ditujukan kepada organisasi-organisasi sektor publik tersebut kemudian menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya konsep manajemen publik modern atau lebih dikenal dengan *New Public Management*.

Tujuan *New Public Management* adalah menjadikan sektor publik sebagai organisasi penyedia layanan publik yang efisien dan efektif. Konsep *New public management* mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik, yaitu melalui anggaran berbasis kinerja yang menekankan konsep *value for money*

dan pengawasan atas kinerja output. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran kinerja tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Dimilikinya sistem pengukuran kinerja yang handal (*reliable*) merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi.

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan adalah salah satu SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Blitar dengan tugas pokok dan fungsi dinas adalah menyelenggarakan pembangunan infrastruktur di bidang jalan, jembatan dan irigasi yang dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan yang ada di dinas. Untuk melaksanakan program/ kegiatan dinas tersebut diperlukan anggaran yang cukup besar sehingga hasil dari program/ kegiatan tersebut dapat dinikmati masyarakat. Terwujudnya prasarana jalan, jembatan dan irigasi yang baik merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi masyarakat. Terciptanya pembangunan jalan, jembatan dan irigasi sehingga dapat merata dan dinikmati oleh masyarakat tentu harus didukung oleh peran serta pemerintah dalam menyediakan anggaran yang memadai untuk membiayai program pembangunan tersebut.

Namun dikhawatirkan, dengan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan pembangunan tersebut belum sepenuhnya dapat memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat, dikarenakan tidak efisien dalam penggunaan dana serta terjadi pemborosan anggaran yang sia-sia, sehingga hasil pembangunan kurang maksimal dari segi kualitas. Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena masyarakat sudah membayar pajak namun mereka tidak bisa menikmati pembangunan dari pemerintah. Sekarang ini, berbagai tuntutan masyarakat tentang pembangunan dan perbaikan jalan/ jembatan yang rusak serta pembangunan saluran irigasi untuk petani, diharapkan mampu direalisasikan pemerintah melalui program-program kerjanya. Maka dengan ini tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan Pemerintah, dalam hal ini Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar semakin banyak, termasuk kesiapan dalam menghadapi evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan. Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi Pemerintah adalah dengan melihat kinerja anggaran melalui perhitungan dan analisis terhadap pencapaian target dan realisasi dari anggaran terhadap program-program kerja dinas yang dibiayai melalui anggaran APBD, baik dari sisi *input, output, impact, dan benefit*-nya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian **“Analisis Pengukuran Kinerja Anggaran pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar”** untuk mengetahui kinerja Dinas diukur dari *Value For Money* anggaran dan sebagai evaluasi agar Pemerintah dapat

meningkatkan akuntabilitas dan kinerjanya dimasa yang akan datang sehingga dapat tercipta *good governance* di Pemerintah Kabupaten Blitar.

B. Permasalahan

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar adalah salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Blitar yang banyak menyerap anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan program-program dinas, tetapi masih belum efektif, sehingga diperlukan adanya pengukuran kinerja anggaran untuk mengetahui sejauh mana anggaran dari rakyat tersebut digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Selain itu pentingnya penilaian kinerja anggaran untuk mengetahui apakah Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar telah melaksanakan program kerjanya dengan baik, terlebih pelaksanaan program-program yang langsung berhubungan dengan pembangunan infrastruktur karena secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan program-program kerja di Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar yang menelan anggaran biaya yang cukup besar, maka perlu adanya pengukuran yang tepat mengenai penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

Bagaimana Pengukuran Kinerja Anggaran Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar ditinjau dari *Value For Money* agar bernilai efektif?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pengukuran kinerja anggaran pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, diantaranya yaitu :

1. Bagi penulis

Sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat kesarjanaan Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar dan sebagai penerapan dari mata kuliah yang pernah dipelajari sebelumnya serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penulis.

2. Bagi instansi pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar untuk mewujudkan *good governance*.

3. Bagi pihak lain

Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan akan menjadi input

guna menambah wawasan dan pengetahuan untuk acuan penelitian sejenis berikutnya, khususnya dalam bidang kajian akuntansi sektor publik.